

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat yang masuk ke dalam kas negara berlandaskan undang-undang. Iuran ini hakikatnya memiliki sifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pajak memiliki peran dalam pembangunan di Indonesia yang bisa dibilang sangat besar, karena pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, dimana fungsi *budgetair* memiliki makna pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi *regulerend* berarti pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016). Per 31 Desember 2016 realisasi pajak mencapai Rp 1.105.000.000.000,00, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.355.000.000.000. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan tahun 2015 (www.beritasatu.com).

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Pemerintah harus membuat kebijakan yang membuat Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara prinsip, kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak itu sendiri dibagi menjadi empat kegiatan utama, yaitu pendaftaran, penghitungan, pembayaran,

dan pelaporan pajak. Semua kegiatan utama tersebut diatur pelaksanaannya secara rinci melalui peraturan dan ketentuan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri, karena kepatuhan ini bersifat sukarela (*voluntary compliance*), maka ada oknum yang tidak patuh dan melakukan penghindaran pajak atau bahkan melanggar aturan perundang-undangan atau *tax evasion* (Supramono,2010). Ada 30 juta orang yang terdaftar menjadi Wajib Pajak dari 60 juta orang pribadi yang berpotensi menjadi wajib pajak, mayoritas wajib pajak terdaftar tersebut berasal dari karyawan yang penghasilannya sudah dipotong pajak. Dari 30 juta wajib pajak terdaftar tersebut, sejumlah 17 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan hanya 10 juta yang menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku (www.pajak.go.id).

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* dilakukan untuk mengatasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh oknum wajib pajak. *Tax amnesty* adalah program pemerintah dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atas harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan (Sakti, 2016). *Tax amnesty* pernah juga diberlakukan pada tahun 1964, yaitu pada era Soekarno. *Tax amnesty* Tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya G30S/PKI. Kemudian pada 1984 yaitu pada era Soeharto, *tax amnesty* juga kembali diberlakukan, namun mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun (www.lembagapajak.com). Target dari *tax amnesty* antara lain membawa kembali dana di luar negeri agar masuk ke Indonesia atau disebut juga repatriasi, memperluas basis data perpajakan (dengan deklarasi dalam negeri), dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan (www.lembagapajak.com). Sampai

tanggal 29 Maret 2017 partisipan *tax amnesty* mencapai 832.631 wajib pajak, keikutsertaan wajib pajak orang pribadi sebanyak 640.488 orang dengan penerimaan uang tebusan sebesar Rp 95,11 triliun, untuk keikutsertaan wajib pajak badan secara keseluruhan berjumlah 192.143 orang dengan penerimaan tebusan senilai Rp13,79 triliun (www.pajak.go.id).

Bapak PB yang berprofesi sebagai pegawai swasta merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bapak PB adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono sejak tahun 2014, belum melaporkan seluruh hartanya. Oleh karena itu, Bapak PB mengikuti kebijakan *tax amnesty* dengan melaporkan seluruh harta yang dimilikinya, dengan harapan agar Bapak PB terhindar dari sanksi administrasi pajak yang bisa jadi jumlahnya lebih besar daripada tebusan yang harus dibayarkan. Melalui uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun Laporan Kerja Praktik Lapangan sebagai Tugas Akhir dengan judul, “Implementasi *Tax Amnesty* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang Bapak PB mengikuti *Tax Amnesty*?
2. Bagaimana Bapak PB mengikuti program *Tax Amnesty*?
3. Apa implikasi pajak bagi Bapak PB karena mengikuti *Tax Amnesty*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang Bapak PB mengikuti *Tax Amnesty*
2. Menunjukkan bagaimana Bapak PB mengikuti program *Tax Amnesty*
3. Menunjukkan implikasi pajak bagi Bapak PB karena mengikuti *Tax Amnesty*

1.4 Manfaat Penulisan

Ada beberapa manfaat dari laporan ini, antara lain bagi penulis sendiri, bagi pembaca atau masyarakat serta bagi perusahaan.

1. Manfaat laporan bagi penulis sendiri, antara lain :

Dapat menjadi materi pembelajaran dalam menerapkan pelaksanaan *Tax Amnesty* pada Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai tata cara dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat selama masa perkuliahan di kampus dan praktik yang didapat pada saat kerja Praktik Kerja Lapangan.

2. Manfaat laporan bagi pembaca atau masyarakat, antara lain :

Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan mengenai penerapan *Tax Amnesty* pada Wajib Pajak Orang Pribadi serta dampaknya.

3. Manfaat laporan bagi perusahaan, antara lain:

Dapat menjadi sumber informasi dan menjadi bahan masukan bagi perusahaan. Laporan ini juga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan perpajakan terutama mengenai *Tax Amnesty* pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan ilustrasi tentang pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi lima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum Kantor Konsultan Pajak dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisianalisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran darihasil penulisan.

